



**PARTISIPASI MIGRAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI KOTA BATAM**  
(MIGRANT PARTICIPANT IN ELECTION OF REGIONAL HEAD IN BATAM CITY)

**Tamama Rofiqah\***

<sup>a</sup>Division of Counseling and Guidance, University, of Riau Kepulauan, Batam

---

**ABSTRAK**

Sebelum menjadi kawasan industrialisasi, Batam hanya sebuah pulau yang sepi dengan jumlah penduduk yang relative kecil yang sebagian besar menetap di kawasan pesisir pantai. Tetapi tata letak lokasi strategis dan ditetapkan sebagai kota industri maka Batam berubah menjadi Kota Pekerja. Hal ini memberikan peluang terjadinya arus migrasi ke Batam. Tingginya tingkat migrasi ke Kota Batam berdampak pada komposisi penduduk setempat, salah satu pengaruhnya adalah dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana partisipasi para migran dalam kegiatan politik lokal terutama dalam pemilihan kepala daerah di kota Batam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa para migran pada umumnya “belum” berpartisipasi dalam kegiatan politik, hanya sebagian kecil saja yang ikut terlibat karena ada kepentingan-kepentingan politis di dalamnya. Para migran rata-rata adalah remaja yang tingkat pendidikannya masih rendah hanya tamatan SMA/Sederajat. Hal ini menjadi salah satu penyebab para migran bersikap “acuh” terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam menyalurkan hak suara pada pemilihan kepala daerah. Selain karena faktor di atas, faktor etnis juga menjadi sebab migran tidak menyalurkan hak politiknya. terungkap bahwa, mereka tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan hanya orang pribumi (dalam hal ini ras Melayu) yang menjadi pilihan dalam pemilihan kepala daerah.

**Kata Kunci:** *Migran, Pemilihan Kepala Daerah*

**ABSTRACT**

*Before becoming an industrialized area, Batam was just a lonely island with a relatively small population that mostly settled in the coastal areas. But the layout of strategic location and set as an industrial city then Batam turned into City Workers. This provides an opportunity for migration flows to Batam. The high level of migration to the city of Batam has an impact on the composition of the local population, one influence is in the election of regional head. This study was conducted to reveal how the participation of migrants in local political activities, especially in the election of regional heads in the city of Batam. This research is qualitative descriptive. The results of the study found that migrants in general "have not" participated in political activities, only a small part has been involved because there are political interests in it. The average migrant is a teenager whose education level is still low only high school / equivalent graduates. This has become one of the causes of migrants being "indifferent" to government policies, including in channeling voting rights to local elections. In addition to the above factors, ethnic factors also cause migrants not to channel their political rights. it was revealed that they did not participate in the regional head election because only indigenous people (in this case the Malay race) were the choice in the regional head election.*

**Keywords:** *Migrant, Election of Regional Head*

---

**Pendahuluan**

Batam merupakan salah satu kota yang letaknya sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kota Batam masuk dalam kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Kependudukan mencatat bahwa Kota Batam merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk mencapai 1.153.860 jiwa.<sup>1</sup> Secara umum, kota Batam merupakan bentuk nyata dari masyarakat plural karena terdiri dari masyarakat dengan beragam suku. Adapun suku yang dominan di Kota Batam adalah Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa. Namun terdapat beberapa suku lain yang juga merupakan masyarakat Kota Batam yaitu suku ambon, minahasa dan flores. Sebagai kota dengan beragam suku dan golongan, Batam termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

---

<sup>1</sup> Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2013.

\*Tamama Rofiqah

Email. [rofiqah87@gmail.com](mailto:rofiqah87@gmail.com)

Pembangunan Kota Batam tersirat dalam keputusan Presiden No.74/1971 tentang pembangunan pulau Batam. Keputusan Presiden tersebut menyebutkan secara jelas bahwa pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri dan dikelola secara khusus dengan membentuk sebuah badan. Badan yang dimaksud adalah Otorita Batam yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden No.41/1973. Sebelum menjadi kawasan industrialisasi, Batam hanya sebuah pulau yang sepi dengan jumlah penduduk yang relative kecil yang sebagian besar menetap di kawasan pesisir pantai. Berdasarkan pada sejarahnya, Batam pertama kali dihuni oleh orang laut, sebutan lainnya adalah orang selat. Penduduk asli kota Batam adalah masyarakat Melayu, mereka dikenal dengan istilah orang tempatan. Dalam perkembangannya, orang Melayu banyak yang pindah ke daerah-daerah *hinterland* Kota Batam karena kalah bersaing dengan para pendatang.

Sampai saat ini arus pendatang dari berbagai daerah terus berlangsung. Padatnya penduduk karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah lain memunculkan masalah tersendiri dari pemerintah setempat. Pertumbuhan penduduk dengan laju percepatan penduduk karena banyaknya pendatang dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, status sosial dan budaya membawa dampak pada munculnya permasalahan sosial. Batam yang telah berkembang pesat menjadi daerah industri menciptakan permasalahan sosial dan munculnya tindak kejahatan masyarakat, seperti tindak kekerasan, pencurian dsb.

Banyaknya para pendatang yang migrasi ke Kota Batam memunculkan kelompok-kelompok kesukubangsaan yang ditandai dengan adanya kampung-kampung untuk para pendatang. Adanya kesukubangsaan yang direpresentasikan dalam bentuk segregasi kampung muncul sebagai kekuatan sosial bagi masyarakat pendatang dalam memperjuangkan kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya strategis untuk bertahan hidup di Batam. Tumbuhnya perkumpulan sesuku bangsa di Batam merupakan salah satu contoh fenomena yang mewarnai politik lokal di Batam. Perkumpulan sesukubangsa tersebut terjadi pada seluruh suku termasuk para pendatang dan penduduk asli. Kota Batam sebagai daerah industri dengan tingkat migrasi yang tinggi tidak terlepas dari kegiatan politik di dalamnya. Kehadiran para migran memberikan berbagai dampak pada perpolitikan di kota Batam terutama dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi para pendatang (migran) dalam pemilihan kepala daerah di Kota Batam. Bagaimana struktur masyarakat kota Batam ? Apakah mereka (migran) menggunakan hak politik sebagai warga masyarakat ? apakah mereka ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah setempat ? penelitian ini akan menjawab berbagai pertanyaan berkenaan dengan partisipasi migran dalam pemilihan kepala daerah di Kota Batam.

## **Landasan Teori**

### **Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah mempengaruhi perkembangan politik lokal. Sejak desentralisasi bergulir, terjadi kebangkitan politik lokal. Hendratno (2009) menjelaskan bahwa istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah otonomi lebih cenderung berada dalam aspek politik-kekuasaan negara sedangkan desentralisasi lebih cenderung berada dalam aspek

administrasi negara. Antara desentralisasi dengan otonomi daerah mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga sangat susah untuk dipisahkan antara keduanya karena otonomi daerah lahir karena keberadaan adanya desentralisasi. Otonomi daerah merupakan persoalan seberapa besar kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah.

Syaukani, dkk (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa argumentasi mengapa desentralisasi dan otonomi diterapkan dalam pemerintahan daerah, adalah:

1. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari, penerapan desentralisasi maka tentunya ada transfer kewenangan kepada daerah sehingga di selenggarakan pemerintahan lokal dimana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakan daripada dilakukan secara nasional dan sentralistik.

2. Pendidikan politik.

Pemerintahan daerah merupakan pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam suatu negara agar penerapan peraturan tidak terkesan coba-coba dalam menerapkan aturan dalam undang-undang. Kewenangan kepada pemerintah daerah agar dijalankan dengan baik karena masyarakat di daerah sudah dapat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Menurut John Stuart Mill dalam Syaukani, dkk (2005) menyatakan bahwa dengan adanya pemerintahan daerah maka akan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik.

3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.

Pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk meniti karir politik lanjutan, politisi dan anggota legislatif yang handal dan kaliber nasional lahir karena proses yang panjang dan bukan politisi instan dan legislatif instan yang terpilih karena kekuatan uang.

4. Stabilitas nasional

Manfaat dari desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penciptaan politik yang stabil dengan alasan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Stabilitas politik nasional sudah seharusnya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.

5. Kesetaraan politik

Pemerintahan daerah menciptakan kesetaraan politik dengan menciptakan kesempatan untuk terlibat dalam politik salah satunya adalah dalam hal pemberian suara dalam pemilihan. Partisipasi politik yang meluas mengandung makna kesetaraan yang meluas diantara warga masyarakat dalam suatu masyarakat.

## Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Furchan dalam Muhadi (2011) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Secara metodologis, subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu migran/pendatang dengan berbagai kriteria di antaranya, (1) migran dalam usia produktif, (2) Sudah tinggal lebih dari enam

bulan, (3) Bertempat tinggal di kota dan pinggiran kota, (4) Memiliki aliansi dengan organisasi masyarakat pendatang maupun tidak, dan (5) Aktif dalam kehidupan kemasyarakatan. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode observasi dan wawancara, Adapun analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data.

## **Temuan Penelitian**

### **1. Struktur Masyarakat Kota Batam**

Secara umum, kota Batam merupakan bentuk nyata dari masyarakat plural karena terdiri dari masyarakat dengan beragam suku. Batam termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kota Batam memiliki sistem sosial yang kompleks karena terdiri dari tiga jenis masyarakat yaitu masyarakat kota, masyarakat pinggiran dan masyarakat pulau (*Hinterland*). Namun ketiga masyarakat tersebut memiliki perbedaan yang mencolok terutama antara masyarakat kota dan masyarakat pulau. Berbicara mengenai struktur masyarakat Kota Batam tidak terlepas dari keberadaan khas masyarakat asli yaitu ras melayu. Secara umum, sifat khas orang melayu adalah bersifat terbuka kepada setiap orang. Hal inilah yang menjadikan Kota Batam memiliki tingkat arus migrasi yang tinggi sehingga Kota Batam memiliki kehidupan yang multietnis.

### **2. Makna Masyarakat Asli dan Masyarakat Pendatang/Migran**

Kota Batam memberi kesan bahwa kota ini merupakan Kota Bursa Tenaga Kerja. Akibatnya terjadi arus migrasi ke Batam yang berakibat pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Sampai saat ini arus pendatang dari berbagai daerah terus berlangsung. Padatnya penduduk karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah lain memunculkan masalah tersendiri dari pemerintah setempat. Pertumbuhan tersebut karena banyaknya pendatang dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, status sosial dan budaya membawa dampak pada munculnya permasalahan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan responden penelitian, terungkap bahwa masyarakat asli Kota Batam adalah ber-ras Melayu, mayoritas pekerjaan mereka adalah nelayan sedangkan para istri menjadi ibu rumah tangga. Untuk tingkat pendidikan, secara umum masyarakat asli kurang memiliki motivasi untuk menempuh pendidikan, hal ini terlihat dari anak-anak masyarakat pulau yang tidak bersekolah. Selain itu, masyarakat asli juga kurang memiliki keterampilan untuk menjadi buruh di perusahaan yang ada di Kota Batam, akibatnya mereka memilih tinggal di Pulau dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat pendatang atau migran adalah mereka yang datang ke Kota Batam dengan berbagai macam tujuan, baik berpindah tempat tinggal maupun mencari pekerjaan. Sebagai bentuk eksistensi mereka di wilayah migrasi, para pendatang mendirikan kampung-kampung yang diberi nama sesuai dengan nama daerah asal mereka.

### **3. Politik Lokal Masyarakat Kota Batam**

Periode perkembangan sosial politik dan pemerintahan di Kepri pasca reformasi, sangat menarik dikaji selain karena karakteristik kekiniannya, dalam periode ini juga pertumbuhan demokrasi berjalan lebih dinamis dibandingkan dengan periode-periode

sebelumnya. Sejarah mencatat baru di era reformasi, bangsa ini melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kemudian di era ini juga, perkembangan otonomi daerah terus berkembang dengan ditandainya pembentukan daerah otonom baru, mulai dari pengembangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

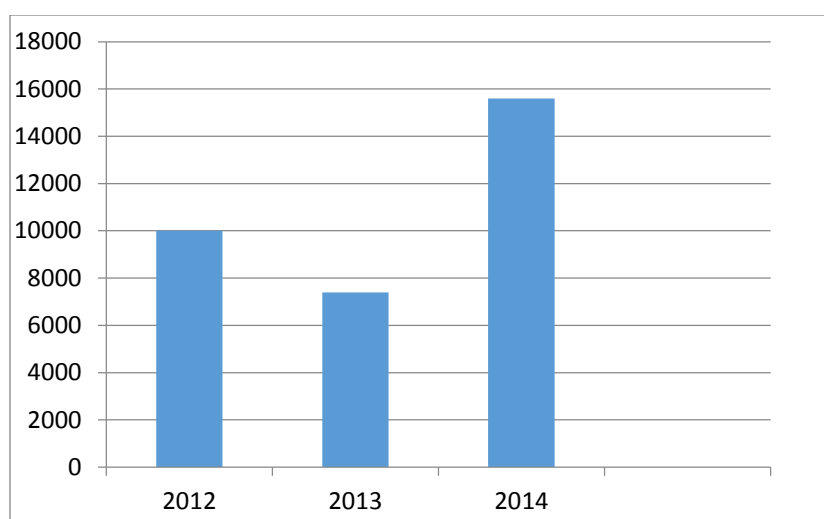
Dinamika perkembangan sosial, politik, dan pemerintahan di Kepri, dipengaruhi juga oleh letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan empat negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja dan terletak di dua jalur lalu lintas perdagangan internasional yaitu Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia dan dua selat yaitu Selat Malaka dan Selat Karimata.

Banyaknya para pendatang yang migrasi ke Kota Batam memunculkan kelompok-kelompok kesukubangsaan yang ditandai dengan adanya kampung-kampung untuk para pendatang. Secara umum, beberapa perkumpulan yang besar di Kota Batam di antaranya, IKSB (Ikatan Keluarga Sumatera Barat) yaitu ikatan organisasi orang minangkabau, Jogoboyo (Perkumpulan Orang Jawa) merupakan organisasi dari orang Jawa, begitu juga dengan Sumatera Utara, mereka mendirikan IKABSU (Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara), PERKIT (Persatuan Keluarga Indonesia Timur) adalah organisasi masyarakat Indonesia bagian Timur, dan PSMTI (Persatuan Marga Tionghoa Seluruh Indonesia), sedangkan penduduk asli melayu memiliki organisasi yaitu KKBM (Kekerabatan dan Keluarga Besar Melayu).

Berkaitan dengan konteks politik di Kota Batam, masing-masing sukubangsa melalui perkumpulan sesukubangsanya mengambil posisi atau peran yang berbeda-beda. Berdasarkan posisi sosial ini, terjadi perbedaan kekuatan sosial pada masing-masing sukubangsa. Perbedaan kekuatan sosial tersebut merupakan konteks bagi berlangsungnya kompetisi dalam perebutan sumberdaya dan posisi strategis. Dengan adanya perkumpulan orang sesukubangsa sebagai wadah pengorganisasian diri, maka batas-batas sosial sukubangsa itu dapat dan cenderung dipertahankan. Batam dianggap sebagai kota yang tidak memiliki kebudayaan yang dominan sehingga menciptakan kompetisi yang luas di antara masing-masing individu atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan di bidang politik.

#### **4. Arus Migran di Kota Batam**

Politik demografi adalah sebuah kajian tentang bagaimana perubahan kependudukan mempengaruhi politik. Perubahan kependudukan didorong oleh berbagai mekanisme demografis seperti kelahiran, kematian, struktur umur dan migrasi. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam mengungkapkan bahwa selama periode Januari-Desember 2014 jumlah migrasi yang masuk ke kota Batam berjumlah 15.685 orang atau rata-rata per bulan 1.307 orang, naik sebesar 110,06 % dibandingkan keadaan tahun 2013 dengan jumlah migrasi sebanyak 7.467 orang dengan rata-rata perbulan 622 orang. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Jumlah Migrasi yang Masuk ke Kota Batam

Jika dilihat dari grafik tersebut, pada tahun 2014 terjadi kenaikan migran yang signifikan. Para migran yang datang ke kota Batam terdiri dari berbagai jenis suku dan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Permasalahan kependudukan secara umum meliputi empat hal, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, kualitas penduduk yang masih rendah, penyebaran penduduk yang tidak merata dan berkenaan dengan data, informasi, administrasi kependudukan yang tidak akurat, tidak tersedia lengkap ataupun tumpang tindih. Jika dikaitkan dengan politik demografi, keempat hal tersebut menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah dan politik. Myron Weiner (1971) mengemukakan bahwa politik demografi adalah sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana ukuran, komposisi dan distribusi penduduk terkait dengan pemerintah dan politik.

Dampak politik terhadap kependudukan juga menonjol dalam kasus migrasi antar pulau di Indonesia. Tingginya migrasi dari satu daerah ke daerah lain telah mengubah komposisi penduduk di daerah tujuan migran dan hal ini pada gilirannya akan memunculkan berbagai konflik baik konflik antar suku maupun antar agama. Tingginya tingkat migrasi ke Kota Batam juga berdampak pada komposisi penduduk setempat. Kota Batam yang dulu merupakan pulau yang sepi dengan jumlah penduduk yang relative kecil bertransformasi menjadi daerah dengan kemajuan penduduk yang pesat, berkembang menjadi daerah multietnis dan plural. Hal ini mengakibatkan penduduk asli kota Batam yakni orang Melayu banyak yang pindah ke daerah-daerah *hinterland* Kota Batam karena kalah bersaing dengan para pendatang. Mereka memilih tinggal di Pulau dengan mata pencaharian sebagai nelayan.

Sedangkan para migran yang datang ke kota Batam dengan beragam suku tumbuh melalui perkumpulan sesukubangsa merupakan salah satu contoh fenomena yang juga mewarnai politik lokal di Batam. Masing-masing sukubangsa tersebut melalui perkumpulan sesukubangsanya mengambil posisi atau peran yang berbeda-beda. Berdasarkan posisi sosial ini, terjadi perbedaan kekuatan sosial pada masing-masing sukubangsa. Perbedaan kekuatan sosial tersebut merupakan konteks bagi berlangsungnya kompetisi dalam perebutan sumberdaya dan posisi strategis. Batam dianggap sebagai kota yang tidak memiliki kebudayaan yang dominan sehingga menciptakan kompetisi yang luas di antara masing-masing individu atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan di bidang politik seperti contoh dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

## 5. Partisipasi Migran dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa setiap individu memiliki hak dalam berpolitik, baik laki-laki maupun perempuan, baik penduduk suatu daerah maupun para pendatang atau migran. Partisipasi migran dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari perannya sebagai warga dalam menggunakan hak pilih dengan benar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa :

- a. Mayoritas migran datang ke kota Batam dengan tujuan mencari pekerjaan, mereka adalah perempuan usia produktif berkisar antara usia 19-25 tahun. rata-rata mereka hanya tamat SMA/ sederajat. Sebagian ada yang menetap menjadi warga kota Batam dan sebagian lain menetap di Kota Batam berdasarkan jangka waktu dari perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan. Hal ini mengakibatkan mereka kurang tertarik untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik.
- b. Para migran yang terlibat dalam kegiatan politik adalah mereka yang tergabung aktif dalam perkumpulan sukubangsa dan partai politik serta berusia di atas 35 tahun dan telah lama menetap di Kota Batam. Ditinjau dari pendidikannya, para migran yang terlibat dalam kegiatan politik adalah mereka yang telah menempuh pendidikan tinggi baik sarjana maupun pascasarjana.
- c. Secara umum kepemilikan KTP para migran ditujukan untuk mempermudah administrasi yang ada di Kota Batam, seperti melamar pekerjaan, membeli properti, kendaraan, dan sebagainya bukan digunakan sebagai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.
- d. Terdapat beberapa alasan, para migran tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah, yaitu : (1) mereka tidak mengenal calon kepala daerah yang akan dipilih sehingga mereka cenderung tidak mempunyai pilihan, (2) mereka mengenal calon kepala daerah terutama yang berasal dari sukubangsa yang sama tetapi mereka merasakan tidak ada kepentingan untuk diri sendiri sehingga mereka tidak ikut dalam pemilihan tersebut, (3) mereka tidak terdaftar sebagai pemilih dikarenakan pendataan yang kurang optimal dari tim KPU.<sup>2</sup>

Berdasarkan data-data di atas, jika mengacu kepada partisipasi migran dalam pemilihan kepala daerah jelas tampak bahwa mereka “belum” berpartisipasi dalam kegiatan politik, hanya sebagian kecil saja yang ikut terlibat karena ada kepentingan-kepentingan politis di dalamnya. Fakta menunjukkan bahwa pengetahuan tentang politik berpengaruh terhadap sikap politik seseorang. Para migran rata-rata adalah remaja yang tingkat pendidikannya masih rendah hanya tamatan SMA/Sederajat. Hal ini menjadi salah satu penyebab para migran bersikap “acuh” terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam menyalurkan hak suara pada pemilihan kepala daerah. Kebanyakan responden menyatakan bahwa, mereka tidak mengenal calon kepala daerah yang akan mereka pilih, sehingga mereka tidak ikut serta dalam proses pemilihan. Selain karena faktor di atas, faktor etnis juga menjadi sebab migran tidak menyalurkan hak politiknya. Dari wawancara terungkap bahwa, mereka tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan hanya orang pribumi (dalam hal ini ras melayu) yang menjadi pilihan dalam pemilihan kepala daerah.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian, 2017.

## Kesimpulan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti orang tersebut menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Partisipasi migran dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari peranannya dalam dinamika politik lokal di Batam “belum” dijalankan secara optimal terutama dalam menyalurkan hak politik pada saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya antara lain tingkat pendidikan para migran yang rendah, para migran berusia produktif dan berorientasi mencari pekerjaan semata, kurangnya pengetahuan terhadap perannya dalam politik dan kurang aktif dalam kegiatan organisasi baik kelembagaan maupun kemasyarakatan.

## Implikasi

Adanya demokratisasi dan desentralisasi berdampak kepada perubahan tata politik dan tata pemerintahan terhadap perubahan arah dalam dinamika kependudukan. Demikian juga dengan pola migrasi yang berlangsung. Banyak daerah yang sebelumnya didominasi oleh etnik lokal dan agama tertentu berangsur-angsur bergeser menjadi daerah yang multietnis dan plural. Para elit politik yang bersaing untuk menjadi wakil rakyat atau penguasa eksekutif di daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kependudukan. Untuk mendapatkan suara mereka harus dapat diterima dan mendapat suara dari kelompok-kelompok minoritas yang sedang tumbuh. Pemberian pengetahuan politik terhadap para migran memungkinkan mereka memiliki sikap peduli terhadap dinamika politik. Kesadaran akan perannya dalam politik akan membuat para migran menjadi kekuatan yang mampu memberikan warna pada perpolitikan lokal terutama dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2013  
 Hendratno. Edie Toe, 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Jakarta: Graha Ilmu.  
 Keputusan Presiden No.41/1973 tentang Otorita Batam  
 Keputusan Presiden No.74/1971 tentang pembangunan pulau Batam  
 Syaokani, dkk, 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
 Weiner, Myron. 1971. *Political Demography: An Inquiry into the political consequences of population change*. In National Academy of Sciences, *Rapid Population Growth: Consequences and Policy Implications*. Baltimore: The John Hopkins Press.